

BAB II

LATAR BELAKANG OPERASI MANDALA UPAYA PEMBEBASAN IRIAN BARAT KE-NKRI TAHUN 1962

A. KEGAGALAN HUBUNGAN DIPLOMASI ANTARA INDONESIA DAN BELANDA MENGENAI IRIAN BARAT

Belanda berupaya menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia dengan cara kekerasan mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda pun terpaksa maju ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik dengan pihak Indonesia. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda Satu perundingan yang menjadi tonggak diakuinya kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.¹

Dunia internasional mendesak Belanda untuk melakukan pendekatan-pendekatan politis terhadap pihak Indonesia. Langkah itu diawali dengan undangan Perdana Menteri Belanda Dr. Drees kepada Prof. Dr. Supomo, salah seorang anggota delegasi Republik Indonesia dalam lanjutan perundingan Renville. Selain itu, Belanda juga melakukan pertemuan dengan delegasi *Bijeenkomst voor Federaal*

¹ Taufik Adi Susilo, *Soekarno: Biografi Singkat (1901 – 1970)*, (Yogyakarta: Garasi, 2008), p. 119

Overleg (BFO) yang terdiri atas Mr. Djumhana dan dr. Ateng, serta dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 13 Februari 1949 Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan bawa aperundingan dapat dimulai jika pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik mundur sesuai dengan resolusi PBB. Keinginan Hatta tersebut disetujui pula oleh BOF.²

Pada tanggal 4 Agustus 1949, delegasi Indonesia yang mengikuti Konfrensi Meja Bundar (KMB) terdiri atas Dr. Moh. Hatta, Mr. Moh. roem, Prof. Dr. Mr. Supomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadianto, dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Yang di dampingi oleh delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Konfrensi Meja Bundar dimulai di Den Haag pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949.³ Adapun hasil perundingan Konfrensi Meja Bundar (KMB) adalah sebagai berikut :

1. Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), kecuali Irian Barat yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun.

² Taufik Adi Susilo, *Soekarno: Biografi Singkat (1901 – 1970)*,...,p.119

³ Taufik Adi Susilo, *Soekarno: Biografi Singkat (1901 – 1970)*,...,p.121

2. Dibentuknya sebuah Uni Belanda-Indonesia, dengan kerajaan Belanda sebagai pemimpinnya.
3. Pengembalian hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Sementara Bung Karno yang terobsesi dan tak dapat ditahan mengenai pembahasan Irian Barat. Sebaliknya Bung Hatta yang memimpin delegasi Indonesia ke perundingan Konperensi Meja Bundar (KMB) dalam pidatonya pada penutupan KMB 2 November 1949 mengatakan, “kegembiraan kami sedikit tertekan karena tidak semua soal dapat diselesaikan pada KMB ini, Irian Barat atau Nieuw Guinea masih dalam persengketaan dan akan diusahakan penyelesaiannya dalam satu tahun sesudah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)”.⁴

Kemudian dalam pidatonya ketika memberikan keterangan pemerintah kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengenai persetujuan KMB, pada tanggal 25 November 1949 Bung Hatta mengatakan: “orang akan berkata bahwa kemerdekaan seratus persen belum tercapai, karena soal Irian Barat masih menggantung, memang, soal Irian Barat adalah suatu hal yang sulit menyelesaikannya dalam KMB, sungguh pun mudah pada pokoknya. Sedangkn Subandrio

⁴ Subandrio, *Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian Barat*, (Jakarta: Yayasan Kepada Bangsa, 2001), p. 28

mengatakan, mudah pada pokoknya, karena soal ini tidak ada seluk-beluknya. Soalnya adalah soal *ya* atau *tidak*, Irian Barat masuk Republik Indonesia Serikat ataukah tidak.⁵

Pihak Indonesia berpendapat, Irian Barat masuk dalam lingkungan pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Belanda menyatakan tidak termasuk. Dalam pertentangan pendirian yang begitu tajam antara Belanda dengan Indonesia, hanya ada dua jalan untuk mencapai penyelesaiannya. Pertama, menunda penyelesaiannya sampai kemudian hari, atau kedua, tegas pada pendirian masing-masing dengan menerima deadlock. Dalam keadaan semacam itu, jalan sebaiknya ialah menunda penyelesaian. Orang yang berpendirian samaunya harus tercapai seratus persen sekaligus, tentu tidak puas dengan cara begitu. Tetapi adakah jalan untuk mencapai tuntutan itu sekarang juga? Orang yang mempunyai kepercayaan bahwa waktu memihak kita, berani menerima penyelesaian soal Irian Barat di masa mendatang. Belanda akan mengalami dengan sendirinya di dalam waktu, bahwa menahan Irian Barat di luar Indonesia, tidak akan menguntungkannya.⁶

Demikian Hatta, pada suatu ketika pembebasan Irian Barat semakin meningkat, Bung Hatta tidak ikut larut di dalamnya dan masih sempat berkata: "kalau kita mau menyerang Irian Barat dengan kapal-

⁵ Subandrio, *Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian Barat*,...,p.29

⁶ Subandrio, *Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian Barat*,...,p.29

kapal kita yang ada sekarang, sudahkah dipikirkan bahwa kapal-kapal itu tidak lebih dari semacam kapal kotak sabun yang tidak bisa digunakan untuk berperang, sewaktu Bung Hatta mengatakan kata-kata itu banyak yang merasa tersinggung. Sikap Bung Hatta yang tidak terpengaruh oleh kesibukan untuk buru-buru membebaskan Irian Barat.⁷

Sedangkan Subandrio mengenai masalah perjuangan membebaskan Irian Barat, berpihak dan bergabung dengan Bung Karno, kemudian Bung Karno mengangkat Subandrio menjadi Menteri Luar Negeri dengan tugas mencari jalan bagaimana bisa segera membebaskan Irian Barat. Dalam Konprensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag dari tanggal 21 Agustus-2 November 1949, terlihat dengan jelas bahwa Belanda ingin memisahkan Irian Barat dari Indonesia.

Pendirian Belanda berpegang pada persetujuan yang menyatakan bahwa *setatusquo* kresidenan Irian Barat harus dipertahankan dengan ketentuan bahwa dalam pengalihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah status politik Irian Barat akan diputuskan melalui negosiasi antara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda. Dalam persetujuan itu berbunyi, “*setatus quo*

⁷ Subandrio, *Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian Barat*,...,p.30

perovinsi Irian Barat harus dipertahankan dengan ketentuan bahwa dalam pengalihan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, masalah setatus politik Irian Barat akan diptuskan melalui negosiasi antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.⁸

Salah satu program Kabinet Kerja yang dicetus oleh Presiden Soekarno adalah pembebasan Irian Jaya (dulu Irian Barat) yang pada hakikatnya adalah tuntutan nasional secara mutlak. Merupakan terdiri dari beberapa pasal: Pasal 1 persetujuan Konfrensi Meja Bundar (KMB), mengenai “penyerahan kedaulatan” atas Indonesia berbunyi: “kerajaan belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya atas Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut dan karena itu mengakui Indonesia serikat sebagai negara yang berdaulat.”⁹

Berpegang teguh pada isi perjanjian KMB, bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, maka berbagai usaha baik perundingan langsung antara kedua negara maupun lewat forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dilaksanakan.

Akan tetapi KMB tidak berhasil menyelesaikan salah satu masalah, yaitu penyerahan kekuasaan oleh Kerajaan Belanda atas Irian

⁸ Subandrio, *Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian Barat*,...,p.30

⁹Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),P. 331.

Barat kepada Indonesia. Karena itu untuk masalah tersebut kemudian dicapai suatu kompromi: pasal 2 ayat f piagam penyerahan kedaulatan, berbunyi: “mengenai kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan hak asasi manusia supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, (Nieuw-Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedaulatan Irian Barat akan diselesaikan dengan jalan-jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland”.¹⁰

B. Kegagalan Perundingan Indonesia-Belanda dalam forum PBB

Pembebasan Irian Barat pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo, Indonesia tetap meneruskan perjuangan dibidang diplomasi seperti diketahui bahwa Indonesia telah mulai berusaha menarik perhatian internasional terhadap masalah Irian Barat yang oleh Belanda dianggapnya sebagai internal-question.¹¹

Masalah Irian Barat belum dapat diselesaikan melalui perundingan langsung antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah

¹⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*,...,p.331

¹¹ Burhanussin Lopa,., *Jalan Refolusi Indonesia Membebaskan Irian barat*. (Jakarta: Jaya Upaya,1962).p.60.

Belanda, maka pemerintah Indonesia memperjuangkannya melalui forum internasional yaitu melalui Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pada tahun 1954, yaitu pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo pertama, perjuangan dibidang diplomasi tetap diteruskan. Indonesia meminta perhatian dunia internasional terhadap masalah Irian Barat. Sebagai hasilnya masalah Irian Barat diperdebatkan untuk pertama kalinya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-IX pada tahun 1954.¹²

Sidang ke-IX Majelis Umum PBB dibuka pada bulan September 1954, adapun yang menjadi bahan perdebatan pada Sidang Umum ke-IX Majelis Umum PBB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak Indonesia
 - a. Irian Barat adalah merupakan bagian integral Indonesia
 - b. Sesuai dengan uraian Dr. Van Royen di Dewan Keamanan PBB tahun 1948, bahwa Indonesia paling tidak terdiri atas 17 golongan etnik dan linguistik dan ikatan persatuan nasionalisme dan persatuan bahasa, Irian Barat dengan penduduk daerah lainnya tidak dapat dipakai sebagai ukuran.
 - c. Gerakan-gerakan kemerdekaan di Irian Barat ditekan dengan kekerasan.

¹² Ridhani, *Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat...*,p.23

- d. Kekuasaan Belanda seperti juga pada masa lalu tidak banyak berbuat untuk kemajuan-kemajuan ekonomi dan sosial di Irian Barat.
- e. Ucapan Dr. Van Mook di Konfrensi Denpasar (1946) yang mengatakan tidak ada niatan untuk mengeluarkan *Nieuw Guinea* Barat dari Indonesia.
- f. Persetujuan-persetujuan Linggarjati dan Renville menerima pendirian dasar bahwa *Nederlands Oost Indie* secara keseluruhannya akan diijelmakan dalam suatu negara Indonesia yang merdeka.
- g. KMB adalah suatu kompromi sementara dalam hal penundaan masalah kedaulatan.
- h. Pada tahun 1950, 1951, dan 1952 Indonesia telah berusaha untuk merundingkan masalah itu, tetapi setiap kali ditolak seperti juga yang diadakan pada tahun 1954 dalam rangka pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
- i. Indonesia mencari jalan pemecahan secara damai dan tidak meminta PBB untuk pemecaha segera. Pemerintah Indonesia

hanya meminta agar diadakan perundingan kembali dengan anjuran dan dorongan PBB.¹³

2. Pihak Belanda

- a. Perhatian Belanda yang terutama ialah demi kesejahteraan penduduk asli yang primitif, yang membutuhkan masa perlawanan selama diperlukan.
- b. Belanda tidak menyetujui interpretasi Indonesia tentang penyerahan kedaulatan dalam KMB.
- c. Berbagai konferensi yang diadakan sejak tahun 1949 selalu gagal berhubung ketidak sediaan Indonesia untuk berkompromi.
- d. Belanda merasa berkewajiban memerintah di “*West Nieuw Guinea*” berdasarkan program PBB tentang perintah perlawanan.
- e. Dalam proposal “*West Nieuw Guinea*”, pemerintah Belanda berulang kali mengatakan, bahwa dibutuhkan waktu secukupnya untuk dapat memberikan kesempatan penentuan hari depannya sendiri.¹⁴

Hasil perundingan tidak langsung berupa rumusan akhir yang menyebutkan bahwa PBB menganjurkan agar pemerintah Indonesia

¹³ Ridhani, *Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat...*,p.24.

¹⁴ Ridhani, *Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat...*,p.25.

dan Belanda meneruskan usaha untuk menyelesaikan perselisihan yang ada antara kedua belah pihak selaras dengan asas-asas PBB. tetapi sayang tidak berhasil karena tidak mencapai mayoritas dua pertiga suara.¹⁵

Kemudian pada tahun 1955 yaitu semasa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia berusaha lagi memperjuangkan kembalinya Irian Barat melalui sidang umum PBB yang ke X sebagai jalan kedua kalinya dimana hasilnya pun tidak memuaskan karena sidang umum PBB pada waktu itu, sekedar memberikan arahan agar perundingan Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan di Jenewa sebentar dapat berhasil. Pada tingkat perjuangan diplomasi ini, pemerintah kolonial Belanda dengan sengaja dan siasat yang sama menyatakan kesediaanya berunding dengan Indonesia tetapi dengan syarat-syarat yang berat dan kurang jelas antara lain pada syarat-syarat yang dikemukakan berbunyi “Pembicaraan tentang beberapa soal mengenai Irian Barat dengan pengertian bahwa perihal kedaulatan masing-masing mempertanyakan kebiasaannya saja. Demikian pula ketika diajukan dalam sidang umum PBB ke XI dan XII mengalami kegagalan. Kemudian pada 15 Februari

¹⁵ Burhanussin Lopa., *Jalan Refolusi Indonesia Membebaskan Irian barat*. (Jakarta: Jaya Upaya, 1962).p.60.

1956 pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas untuk membubarkan status Uni dengan Belanda.¹⁶

Setelah setahun Irian Barat masih tetap dikuasai oleh Kerajaan Nederland (Belanda) dan usaha-usaha bilateral telah mengalami kegagalan, maka pemerintah Indonesia sejak tahun 1954 Pemerintah Republik Indonesia berturut-turut membawa masalah Irian didalam acara sidang Majelis Umum PBB. Persoalan Irian Barat berulang-ulang dimasukkan kedalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan yang positif. Pada Majelis Umum PBB 1957 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan dalam pidatonya, ketika ikut dalam perdebatan bahwa Indonesia akan menempuh” jalan lain” yang tidak sampai kepada jalan perang (short of war) untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat dengan Belanda, apabila sidang ke 12 sekali lagi tidak berhasil menyetujui resolusi tentang Irian Barat.¹⁷

C. Kegagalan Perundingan Middelburg

Perundingan persoalan Irian Barat, dimulai dengan pembicaraan rahasia di sebuah tempat di Kota Middelburg dekat Washington

¹⁶ Panglima komando mandala...,p.27.

¹⁷ Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia ...*, P.332.

perundingan antara Indonesia dan Belanda dengan disaksikan pihak ketiga yakni Amerika Serikat. Dari Indonesia dikirim Mr. Sudjarwo Tjondronegoro dan Adam Malik, Duta Besar Republik Indonesia di Moskow untuk bersama dengan Mr. Zairin Zain dan Sukarjo Wirjopranoto, menghadapi delegasi Belanda yang terdiri dari Dr. Van Royen dan Schuurman. Tugas yang diberikan kepada delegasi Indonesia seperti yang diterangkan oleh Presiden Soekarno “Tanyakan kepada Belanda apakah pembicaraan ini merupakan pembicaraan persiapan untuk mengadakan perundingan formal tentang cara-cara menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada Republik Indonesia, atau tidak?”¹⁸ Perundingan rahasia dimulai tanggal 20 Maret 1962, di kota Middlebrug dengan didampingi Bunker sebagai moderator. Pembicaraan hari pertama di Middlebrug dapat dicapai dua persetujuan yaitu :

1. Harus ada pemerintahan sementara di Irian Barat.
2. Setuju untuk menghormati Hak Asasi Rakyat Irian Barat.

Mengenai asas dan pemerintahan sementara tampak perbedaan pendapat. Menurut Indonesia pemerintahan sementara merupakan bentuk peralihan antara pemerintah Belanda dan pemerintahan

¹⁸ Rosihan Anwar, *Soekarno, Tentara, PKI* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), p. 130.

Indonesia. Belanda merasa tidak dapat menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia, karena ini berarti menghilangkan hak asasi rakyat Irian Barat.¹⁹

Bunker berpendapat bahwa pemerintahan sementara bertugas untuk menyoroti hak asasi rakyat Irian Barat. Juga untuk memberi kesempatan kepada Belanda untuk secara berangsur menarik diri dari Irian Barat, dan atas dasar yang sama, menempatkan orang Indonesia sebagai pengganti. Van Rooijen menentang pendapat Bunker, tidak mungkin penyerahan langsung kepada Indonesia tanpa persetujuan Rakyat Irian Barat. Pemerintahan sementara akan berlangsung sampai (datangnya) Irian Barat dapat menentukan nasib sendiri . jika rakyat Irian Barat setuju bergabung dengan Indonesia , maka tidak ada keberatan apapun dari pihak Belanda. Sementara Sujarwo menyatakan, Belanda seharusnya menyelesaikan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia sudah sejak 1949, dengan melengkapi penyerahan Irian Barat pada Indonesia, hak asasi Irian Barat dibicarakan selanjutnya dan Indonesia menjamin akan dilaksanakan mengenai hak asasi rakyat Irian Barat.²⁰

¹⁹ Subandrio, *Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat* (Jakarta: Yayasan Kepada Bangsa, 2001), p 55.

²⁰ Subandrio, *Meluruskan Sejarah Pembebasan Irian Barat*,...,p.56